



KOTA SAMARINDA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1. Maksud.

Penyusunan Laporan Keuangan dimaksudkan untuk menyediakan informasi sebagai pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Kota Samarinda, kekayaan bersih yang dimiliki, keadaan keuangan serta penjelasan-penjelasan mengenai hal tersebut dan kinerja keuangan berkenaan dengan sasaran strategis.

2. Tujuan.

Penyusunan Laporan Keuangan bertujuan menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan (Sekretariat Daerah Kota Samarinda) atas sumber daya yang dipercayakannya kepadanya yaitu informasi mengenai :

- 1) Sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- 2) Ketaatan realisasi terhadap anggarannya;

- 3) Posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas serta perubahannya;
- 4) Cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- 5) Potensi entitas pelaporan untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- 6) Hal yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Laporan Keuangan sebagaimana disebut diatas terdiri dari :

- 1) Laporan Realisasi Anggaran,
Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Lampiran LRA disusun sesuai program dan kegiatan yang berada pada Sekretariat Daerah Kota Samarinda sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- 2) Neraca Daerah,
Neraca Daerah per 31 Desember 2025 ini merupakan neraca yang disesuaikan sehubungan dengan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan yang menggambarkan posisi keuangan Sekretariat Daerah Kota Samarinda.
- 3) Laporan Operasional,
Laporan Operasional ini menyajikan informasi keuangan terkait dengan kegiatan operasional Sekretariat Daerah Kota Samarinda.
- 4) Laporan Perubahan Ekuitas,
Laporan Perubahan Ekuitas ini menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- 5) Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan ini merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam LRA, Laporan Operasional, Neraca, dan Laporan Perubahan Ekuitas, serta Pembahasan kinerja keuangan sesuai program dan kegiatan.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum yang dijadikan dasar dalam penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Samarinda yaitu :

1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodeifikasi Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2021 Nomor 30);
15. Peraturan Wali Kota Nomor 74 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Wali Kota Nomor 55 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 69 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Wali Kota Nomor 50 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 78 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2025;
 19. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2025;
 20. Peraturan Wali Kota Nomor 63 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 21. Peraturan Wali Kota Nomor 74 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- Dengan berpedoman pada ketentuan tersebut, Sekretariat Daerah Kota Samarinda berkomitmen untuk menyusun laporan keuangan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip penyajian yang wajar, sehingga dapat memberikan informasi yang andal bagi seluruh pemangku kepentingan.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
Memuat penjelasan mengenai maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD.
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
Memuat penjelasan mengenai peraturan-peraturan yang menjadi landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD.
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD
Memuat penjelasan mengenai sistematika penyajian dan penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD.

BAB II. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD SKPD

2.1 Ekonomi Makro

Memuat penjelasan mengenai asumsi makro ekonomi yang melandasi penyusunan laporan keuangan SKPD.

2.2 Kebijakan Keuangan

Memuat penjelasan mengenai kebijakan keuangan yang digunakan dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca SKPD yakni tentang posisi dan kondisi keuangan periode berjalan dibandingkan periode sebelumnya.

2.3 Indikator Pencapaian target kinerja Keuangan SKPD

Memuat penjelasan mengenai informasi kinerja keuangan beserta penjelasan mengenai keberhasilan dan kegagalan kinerja Anggaran Sekretariat Daerah Kota Samarinda yang dicerminkan melalui indikator pelaksanaan program/ kegiatan.

BAB III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD

Memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja Anggaran Sekretariat Daerah Kota Samarinda, terutama realisasi pencapaian efektivitas dan efisiensi program dan kegiatan yang dilaksanakan.

3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Memuat hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan baik bersifat yang dapat dikendalikan maupun yang tidak dapat dikendalikan.

BAB IV. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

4.1 Penjelasan Neraca Per 31 Desember 2025

4.2 Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran 2025

4.3 Penjelasan Laporan Operasional

4.4 Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas

BAB V. PENUTUP

Memuat uraian penutup yang dapat berupa simpulan-simpulan penting tentang laporan keuangan.

BAB II. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA

2.1. Ekonomi Makro

Asumsi yang digunakan dalam penyusunan Anggaran Sekretariat Daerah Kota Samarinda tahun 2025 berdasarkan asumsi yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026 dan didasarkan pada PPAS yang telah disepakati.

2.2. Kebijakan Keuangan

Sekretariat Daerah Kota Samarinda telah menetapkan Kebijakan Umum dalam pelaksanaan anggaran yang ada yakni sebagai berikut :

Dalam hal kebijakan umum pendapatan dilakukan dengan menerapkan langkah-langkah intensifikasi dan ekstensifikasi untuk memenuhi target pendapatan yang telah ditetapkan. Sedang dalam hal kebijakan umum belanja dengan melakukan langkah-langkah penghematan melalui penerapan anggaran berbasis kinerja yakni pengeluaran belanja digunakan seefektif dan seefisien mungkin dengan memanfaatkan plafon anggaran yang tersedia.

Adapun realisasi Pendapatan serta kinerja belanja untuk melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan, yang bersumber dari anggaran Belanja Tidak Langsung dan Anggaran Belanja Langsung Tahun Anggaran 2025, dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Realisasi Anggaran Pendapatan

Realisasi Anggaran Pendapatan Sekretariat Kota Samarinda Tahun 2025 adalah sebesar Rp.77.124.000,00 atau sekitar 62,76%. Pendapatan ini merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari Pendapatan Retribusi Daerah berupa hasil dari Penyewaan Bis Pemkot Samarinda selama tahun 2025.

b. Realisasi Anggaran Belanja

Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2025 pada Sekretariat Kota Samarinda adalah sebesar Rp.130.093.660.519,00 atau sekitar 92,01% dari anggaran yang tersedia dalam DPA sebesar Rp.141.389.763.276,00.

Dengan rincian per rekening sebagai berikut :

NO	BELANJA	ANGGARAN (Rp)	REALISASI		SISA
			(Rp)	(%)	
1	BELANJA OPERASI	110,255,372,748.00	101,164,639,520.00	91.75	9,090,733,228.00
1	Belanja Pegawai	32,559,985,289.00	29,917,972,068.00	91.89	2,642,013,221.00
2	Belanja Barang dan Jasa	76,995,387,459.00	70,546,667,452.00	91.62	6,448,720,007.00
3	Belanja Hibah	700,000,000.00	700,000,000.00	100.00	-
2	BELANJA MODAL	31,134,390,528.00	28,929,020,999.00	92.92	2,205,369,529.00
1	Belanja Modal Tanah	23,006,451,144.00	23,006,451,144.00	100.00	-
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4,290,497,998.00	2,337,604,055.00	54.48	1,952,893,943.00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3,695,841,386.00	3,451,957,800.00	93.40	243,883,586.00
4	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	141,600,000.00	133,008,000.00	93.93	8,592,000.00
	JUMLAH	141,389,763,276.00	130,093,660,519.00	92.01	11,296,102,757.00

Dari data pada tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi Anggaran Belanja Tahun 2025 dari sisi keuangan pada Sekretariat Kota Samarinda telah menyerap dana sebesar 92,01% dari anggaran yang disediakan. Dana yang belum terserap adalah Belanja Operasi sebesar 8,25% dan Belanja Modal sebesar 7,08%.

Hal tersebut dikarenakan oleh beberapa hal sebagai berikut :

Terdapat beberapa kegiatan yang realisasinya di bawah 60% yakni :

1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Dalam tahun 2025 telah direalisasikan sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Kegiatan ini telah menyerap dana sebesar

Rp.557.152.899,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp.1.240.210.200,00 atau sekitar 44,92%.

2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Dalam tahun 2025 telah direalisasikan sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga. Kegiatan ini telah menyerap dana sebesar Rp.365.786.006,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp.734.489.874,00 atau sekitar 49,80%.

3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Dalam tahun 2025 telah direalisasikan sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya. Kegiatan ini telah menyerap dana sebesar Rp.86.623.800,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp.300.245.000,00 atau sekitar 28,85%.

4. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya

Dalam tahun 2025 telah direalisasikan sub kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya. Kegiatan ini telah menyerap dana sebesar Rp.112.676.431,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp.251.508.000,00 atau sekitar 44,80%.

5. Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Dalam tahun 2025 telah direalisasikan sub kegiatan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Kegiatan ini telah menyerap dana sebesar Rp.224.791.493,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp.667.553.950,00 atau sekitar 33,67%.

6. Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Dalam tahun 2025 telah direalisasikan sub kegiatan Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH. Kegiatan ini menyerap dana sebesar Rp 0 dari alokasi anggaran sebesar Rp.103.000.000,00 atau sekitar 0 %.

7. Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah

Dalam tahun 2025 telah direalisasikan sub kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah. Kegiatan ini telah menyerap dana sebesar Rp.38.690.000,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp.74.725.000,00 atau sekitar 51,78%.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja Anggaran Sekretariat Daerah Kota Samarinda

Dalam tahun anggaran 2025 sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan 2025 terdapat 3 program dan 19 kegiatan yang telah dilaksanakan, dengan pencapaian untuk masing-masing program dan kegiatan sebagaimana dijelaskan berikut ini :

2.3.1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA, ada 11 kegiatan yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terdiri dari 7 Sub Kegiatan yaitu :

1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Dalam tahun 2025 telah direalisasikan sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. Kegiatan tersebut guna pemenuhan kebutuhan belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia, belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa. Kegiatan ini telah menyerap dana sebesar Rp.151.396.000,00

dari alokasi anggaran sebesar Rp.183.046.000,00 atau sekitar 82,71%. Dengan terserapnya anggaran sebesar Rp.151.396.000,00 maka telah mendukung pencapaian target Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sangat baik.

1.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Dalam tahun 2025 telah direalisasikan sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. Kegiatan tersebut guna pemenuhan kebutuhan belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa. Kegiatan ini telah menyerap dana sebesar Rp.50.489.100,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp.51.289.100,00 atau sekitar 98,44%. Dengan terserapnya anggaran sebesar Rp.50.489.100,00 maka telah mendukung pencapaian target Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sangat baik.

1.3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Dalam tahun 2025 telah direalisasikan sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Kegiatan tersebut guna pemenuhan kebutuhan belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak, dan Belanja Makanan dan Minuman Rapat, belanja Honorarium Penanggungjawaban

Pengelola Keuangan, dan Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa. Kegiatan ini telah menyerap dana sebesar Rp.43.943.000,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp.44.375.000,00 atau sekitar 99,03%. Dengan terserapnya anggaran sebesar Rp.43.943.000,00 maka telah mendukung pencapaian target Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sangat baik.

1.4 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah

Dalam tahun 2025 telah direalisasikan sub kegiatan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah. Kegiatan tersebut guna pemenuhan kebutuhan belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak, dan Belanja Makanan dan Minuman Rapat, dan Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa. Kegiatan ini telah menyerap dana sebesar Rp.19.430.000,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp.19.750.000,00 atau sekitar 98,38%. Dengan terserapnya anggaran sebesar Rp. 19.430.000,00 maka telah mendukung pencapaian target Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sangat baik.

1.5 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah

Dalam tahun 2025 telah direalisasikan sub kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah. Kegiatan tersebut guna pemenuhan kebutuhan belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak, dan Belanja Makanan dan Minuman Rapat, dan Belanja Honorarium

Pengadaan Barang/Jasa. Kegiatan ini telah menyerap dana sebesar Rp.19.715.000,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp.19.750.000,00 atau sekitar 99,82%. Dengan terserapnya anggaran sebesar Rp.19.715.000,00 maka telah mendukung pencapaian target Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sangat baik.

1.6 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Dalam tahun 2025 telah direalisasikan sub kegiatan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. Kegiatan tersebut guna pemenuhan kebutuhan belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak, dan Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, dan Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa. Kegiatan ini telah menyerap dana sebesar Rp.44.060.000,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp.44.375.000,00 atau sekitar 99,29%. Dengan terserapnya anggaran sebesar Rp.44.060.000,00 maka telah mendukung pencapaian target Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sangat baik.

1.7 Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD

Dalam tahun 2025 telah direalisasikan sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD. Kegiatan tersebut guna pemenuhan kebutuhan belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak, dan Belanja Makanan dan Minuman Rapat, dan Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa. Kegiatan ini telah menyerap dana sebesar Rp.19.320.000,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp.19.750.000,00 atau sekitar 97,82%. Dengan terserapnya anggaran sebesar Rp.19.320.000,00 maka telah mendukung pencapaian target Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sangat baik.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdiri dari 3 Sub Kegiatan yaitu :

2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Dalam tahun 2025 telah direalisasikan sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. Kegiatan tersebut guna pemenuhan kebutuhan belanja Gaji dan Tunjangan untuk ASN dan PPPK serta Belanja Tambahan Penghasilan untuk ASN dan PPPK. Kegiatan ini telah menyerap dana sebesar Rp.28.051.060.575,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp.29.988.913.639,00 atau sekitar 93,54%. Dengan terserapnya anggaran sebesar Rp.28.051.060.575,00 maka kebutuhan Gaji dan Tunjangan untuk ASN dan PPPK serta Tambahan Penghasilan untuk ASN dan PPPK telah terpenuhi dan mendukung pencapaian target Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan sangat baik.

2.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Dalam tahun 2025 telah direalisasikan sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN. Kegiatan tersebut guna pemenuhan kebutuhan belanja Jasa Tenaga Administrasi, Belanja Jasa Tenaga Keamanan, Belanja Jasa Tenaga Supir, Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN, Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN, dan Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN. Kegiatan ini telah menyerap dana sebesar Rp.5.528.242.018,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp.5.539.970.890,00 atau sekitar 99,79%. Dengan terserapnya anggaran sebesar Rp.5.528.242.018,00 maka telah mendukung pencapaian target Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan sangat baik.

2.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Dalam tahun 2025 telah direalisasikan sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD. Kegiatan tersebut guna pemenuhan kebutuhan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia, belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan, dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa. Kegiatan ini telah menyerap dana sebesar Rp.115.420.010,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp.138.243.137,00 atau sekitar 83,49%. Dengan terserapnya anggaran sebesar Rp.115.420.010,00 maka telah mendukung

pencapaian target Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan sangat baik.

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terdiri dari 2 Sub Kegiatan yaitu :

3.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Dalam tahun 2025 telah direalisasikan sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya. Kegiatan tersebut guna pemenuhan kebutuhan Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH), Belanja Pakaian Adat Daerah, dan Belanja Jasa Tenaga Ahli. Kegiatan ini telah menyerap dana sebesar Rp.31.500.000,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp.32.000.000,00 atau sekitar 98,44%. Dengan terserapnya anggaran sebesar Rp.31.500.000,00 maka telah mendukung pencapaian target kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan sangat baik.

3.2 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Dalam tahun 2025 telah direalisasikan sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan. Kegiatan tersebut guna pemenuhan kebutuhan Belanja Bimbingan Teknis. Kegiatan ini telah menyerap dana sebesar Rp.5.500.000,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp.5.500.000,00 atau sekitar 100%. Dengan terserapnya anggaran sebesar Rp.5.500.000,00 maka telah mendukung pencapaian target kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan cukup baik.

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri dari 7 Sub Kegiatan yaitu:

4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Dalam tahun 2025 telah direalisasikan sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor. Kegiatan tersebut guna pemenuhan kebutuhan belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik, Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon Air dan Listrik, belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, dan Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya. Kegiatan ini telah menyerap dana sebesar Rp.419.208.681,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp.490.316.500,00 atau sekitar 85,50%. Dengan terserapnya anggaran sebesar Rp.419.208.681,00 maka telah mendukung pencapaian target kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sangat baik.

4.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Dalam tahun 2025 telah direalisasikan sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Kegiatan tersebut guna pemenuhan kebutuhan Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman, Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya, belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga, Belanja Modal Alat Kantor, Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah, Belanja Modal Alat Pendingin, Belanja Modal

Alat Komunikasi Radio VHF, Belanja Modal Personal Computer, Belanja Modal Peralatan Personal Computer, Belanja Modal Elektronik/Electric, dan Belanja Modal Baju Pengaman. Kegiatan ini telah menyerap dana sebesar Rp.557.152.899,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp.1.240.210.200,00 atau sekitar 44,92%. Dengan terserapnya anggaran sebesar Rp.557.152.899,00 maka telah mendukung pencapaian target kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan cukup baik.

4.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Dalam tahun 2025 telah direalisasikan sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga. Kegiatan tersebut guna pemenuhan kebutuhan Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use), Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Belanja Modal Mesin Proses, Belanja Modal Alat Dapur, dan Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use). Kegiatan ini telah menyerap dana sebesar Rp.365.786.006,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp.734.489.874,00 atau sekitar 49,80%. Dengan terserapnya anggaran sebesar Rp.365.786.006,00 maka telah mendukung pencapaian target kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan cukup baik.

4.4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Dalam tahun 2025 telah direalisasikan sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor. Kegiatan tersebut guna pemenuhan kebutuhan Belanja Makanan dan Minuman Rapat, belanja

Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, dan Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa. Kegiatan ini telah menyerap dana sebesar Rp.2.873.253.018,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp.2.944.380.000,00 atau sekitar 97,58%. Dengan terserapnya anggaran sebesar Rp. 2.873.253.018,00 maka telah mendukung pencapaian target kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sangat baik.

4.5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Dalam tahun 2025 telah direalisasikan sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan. Kegiatan tersebut guna pemenuhan kebutuhan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak, belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, dan Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa. Kegiatan ini telah menyerap dana sebesar Rp.312.611.372,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp.448.820.000,00 atau sekitar 69,65%. Dengan terserapnya anggaran sebesar Rp. 312.611.372,00 maka telah mendukung pencapaian target kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan cukup baik.

4.6 Fasilitas Kunjungan Tamu

Dalam tahun 2025 telah direalisasikan sub kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu. Kegiatan tersebut guna pemenuhan kebutuhan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Souvenir/Cinderamata, Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa.

Kegiatan ini telah menyerap dana sebesar Rp.1.418.199.714,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp.1.614.530.000,00 atau sekitar 87,84%. Dengan terserapnya anggaran sebesar Rp. 1.418.199.714,00 maka telah mendukung pencapaian target kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sangat baik.

4.7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Dalam tahun 2025 telah direalisasikan sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. Kegiatan tersebut guna pemenuhan kebutuhan belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, Belanja Perjalanan Dinas Biasa, dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri. Kegiatan ini telah menyerap dana sebesar Rp.2.491.213.756,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp.3.509.473.858,00 atau sekitar 70,99%. Dengan terserapnya anggaran sebesar Rp.2.491.213.756,00 maka kebutuhan belanja perjalanan dinas telah tercukupi dengan baik dan telah mendukung pencapaian target kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan baik.

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri dari 5 Sub Kegiatan yaitu :

5.1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Dalam tahun 2025 telah direalisasikan sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan. Kegiatan tersebut guna pemenuhan kebutuhan belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, Belanja Honorarium

Pengadaan Barang/Jasa, Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang, dan Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang. Kegiatan ini telah menyerap dana sebesar Rp.5.692.072.005,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp.6.245.680.000,00 atau sekitar 91,14%. Dengan terserapnya anggaran sebesar Rp.5.692.072.005,00 maka telah mendukung pencapaian target kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan sangat baik.

5.2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Dalam tahun 2025 telah direalisasikan sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. Kegiatan tersebut guna pemenuhan kebutuhan belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, dan Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang. Kegiatan ini telah menyerap dana sebesar Rp.209.475.000,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp.253.300.000,00 atau sekitar 82,70%. Dengan terserapnya anggaran sebesar Rp.209.475.000,00 maka telah mendukung pencapaian target kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan sangat baik.

5.3 Pengadaan Mebel

Dalam tahun 2025 telah direalisasikan sub kegiatan Pengadaan Mebel. Kegiatan tersebut guna pemenuhan kebutuhan belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Belanja Modal Mebel, Belanja Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat, Modal Meja Kerja

Pejabat, dan Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat. Kegiatan ini telah menyerap dana sebesar Rp.394.746.250,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp.1.084.237.924,00 atau sekitar 36,41%. Dengan terserapnya anggaran sebesar Rp.209.475.000,00 maka telah mendukung pencapaian target kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan cukup baik.

5.4 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Dalam tahun 2025 telah direalisasikan sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya. Kegiatan tersebut guna pemenuhan kebutuhan belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, dan Belanja Modal Pompa. Kegiatan ini telah menyerap dana sebesar Rp.98.958.000,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp.143.900.000,00 atau sekitar 68,77%. Dengan terserapnya anggaran sebesar Rp.209.475.000,00 maka telah mendukung pencapaian target kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan cukup baik.

5.5 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Dalam tahun 2025 telah direalisasikan sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya. Kegiatan tersebut guna pemenuhan kebutuhan belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, dan Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum. Kegiatan ini telah menyerap dana sebesar Rp.86.623.800,00

dari alokasi anggaran sebesar Rp.300.245.000,00 atau sekitar 28,85%. Dengan terserapnya anggaran sebesar Rp.86.623.800,00 maka telah mendukung pencapaian target kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan cukup baik.

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari 3 Sub Kegiatan yaitu :

6.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Dalam tahun 2025 telah direalisasikan sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. Kegiatan tersebut guna pemenuhan kebutuhan Belanja Tagihan Telepon, Belanja Tagihan Air, Belanja Tagihan Listrik dan Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan. Kegiatan ini telah menyerap dana sebesar Rp.3.295.324.421,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp.3.574.444.900,00 atau sekitar 92,19%. Dengan terserapnya anggaran sebesar Rp.3.295.324.421,00 maka kebutuhan telepon, air, listrik internet dan TV Berlangganan telah tercukupi dengan baik dan telah mendukung pencapaian target kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sangat baik.

6.2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Dalam tahun 2025 telah direalisasikan sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Kegiatan tersebut guna pemenuhan kebutuhan Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara, Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan, Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Belanja Sewa Alat Pengolahan

Air Kotor, Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya, Belanja Sewa Mebel, Belanja Sewa Alat Pendingin, Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use), Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor, Belanja Sewa Pagar, Belanja Sewa Audio Visual, dan Belanja Sewa Tanaman. Kegiatan ini telah menyerap dana sebesar Rp.6.299.550.850,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp.6.590.930.000,00 atau sekitar 95,58%. Dengan terserapnya anggaran sebesar Rp.6.299.550.850,00 telah mendukung pencapaian target kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sangat baik.

6.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Dalam tahun 2025 telah direalisasikan sub kegiatan Penyediaan Pelayanan Umum Kantor. Kegiatan tersebut guna pemenuhan kebutuhan Jasa Tenaga Kebersihan, Belanja Jasa Tenaga Keamanan, Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, dan Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa. Kegiatan ini telah menyerap dana sebesar Rp.8.591.174.696,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp.8.777.840.500,00 atau sekitar 97,87%. Dengan terserapnya anggaran sebesar Rp.8.591.174.696,00 telah mendukung pencapaian target kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sangat baik.

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari 5 Sub Kegiatan yaitu :

7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Dalam tahun 2025 telah direalisasikan sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan. Kegiatan tersebut guna pemenuhan kebutuhan Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas, Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan, Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya, Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan, Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Belanja Asuransi Barang Milik Daerah, dan Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan . Kegiatan ini telah menyerap dana sebesar Rp.1.041.678.208,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp.1.332.500.000,00 atau sekitar 78,17%. Dengan terserapnya anggaran sebesar Rp.1.041.678.208,00 telah mendukung pencapaian target kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan baik.

7.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Dalam tahun 2025 telah direalisasikan sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. Kegiatan tersebut guna pemenuhan kebutuhan Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas, Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan, Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel, Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan, Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Belanja Asuransi Barang Milik Daerah, dan Belanja Pemeliharaan

Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan. Kegiatan ini telah menyerap dana sebesar Rp.847.587.215,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp.1.204.000.000,00 atau sekitar 70,40%. Dengan terserapnya anggaran sebesar Rp.847.587.215,00 telah mendukung pencapaian target kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan baik.

7.3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Dalam tahun 2025 telah direalisasikan sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya. Kegiatan tersebut guna pemenuhan kebutuhan Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga, Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya, Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin, Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use), Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan, dan Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer. Kegiatan ini telah menyerap dana sebesar Rp.595.522.470,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp.723.620.000,00 atau sekitar 82,30%. Dengan terserapnya anggaran sebesar Rp.595.522.470,00 telah mendukung pencapaian target kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan baik.

7.4 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya

Dalam tahun 2025 telah direalisasikan sub kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya. Kegiatan tersebut guna pemenuhan kebutuhan Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set, dan Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa. Kegiatan ini telah menyerap dana sebesar Rp.112.676.431,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp.251.508.000,00 atau sekitar 44,80%. Dengan terserapnya anggaran sebesar Rp.112.676.431,00 telah mendukung pencapaian target kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan cukup baik.

7.5 Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Dalam tahun 2025 telah direalisasikan sub kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya. Kegiatan tersebut guna pemenuhan kebutuhan Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi, Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Belanja Asuransi Barang Milik Daerah, Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung, Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang, Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih, Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor, dan Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor . Kegiatan ini telah menyerap dana sebesar Rp.4.526.952.792,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp.4.932.396.386,00 atau sekitar 91,78%. Dengan terserapnya

anggaran sebesar Rp.4.526.952.792,00 maka telah mendukung pencapaian target kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sangat baik.

7.6 Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Dalam tahun 2025 telah direalisasikan sub kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya. Kegiatan tersebut guna pemenuhan kebutuhan Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, dan Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor. Kegiatan ini telah menyerap dana sebesar Rp.537.469.512,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp.869.988.978,00 atau sekitar 61,78%. Dengan terserapnya anggaran sebesar Rp.537.469.512,00 maka telah mendukung pencapaian target kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan cukup baik.

8. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terdiri dari 4 Sub Kegiatan yaitu :

8.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Dalam tahun 2025 telah direalisasikan sub kegiatan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Kegiatan tersebut guna pemenuhan kebutuhan Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH, Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH, Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH, Belanja Tunjangan Bersa

KDH/WKDH, Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH, Belanja Pembulatan Gaji KDH/Wkdh, Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH, Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH dan Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH. Kegiatan ini telah menyerap dana sebesar Rp.224.791.493,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp.667.553.950,00 atau sekitar 33,67%. dengan terserapnya anggaran sebesar Rp. 224.791.493,00 maka telah mendukung pencapaian target kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan cukup baik.

8.2 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Dalam tahun 2025 telah direalisasikan sub kegiatan Penyediaan pakaian dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Kegiatan tersebut guna pemenuhan kebutuhan Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD, Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL), Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH), Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR), Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU), Belanja Pakaian KORPRI, Belanja Pakaian Adat Daerah, Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan dan Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa. Kegiatan ini telah menyerap dana sebesar Rp.379.420.150,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp.442.385.000,00 atau sekitar 85,77%. Dengan terserapnya anggaran sebesar Rp. 379.420.150,00 maka telah mendukung pencapaian target kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan baik.

8.3 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Dalam tahun 2025 telah direalisasikan sub kegiatan Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH. Kegiatan ini menyerap dana sebesar Rp 0 dari alokasi anggaran sebesar Rp.103.000.000,00 atau sekitar 0%. Walaupun realisasi kegiatan ini hanya 0% akan tetapi Kebutuhan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah telah tercukupi hingga mendukung pencapaian target kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan cukup baik.

8.4 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Dalam tahun 2025 telah direalisasikan sub kegiatan penyediaan Dana Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Kegiatan tersebut guna pemenuhan kebutuhan Belanja Dana Operasional KDH/WKDH. Kegiatan ini telah menyerap dana sebesar Rp.1.642.120.000,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp.1.800.517.700,00 atau sekitar 91,20%. Dengan terserapnya anggaran sebesar Rp. 1.642.120.000,00 telah mendukung pencapaian target kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan sangat baik.

9. Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah terdiri dari 3 Sub Kegiatan yaitu :

9.1 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah

Dalam tahun 2025 telah direalisasikan sub kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah. Kegiatan tersebut guna pemenuhan kebutuhan Belanja Jasa Pencucian Pakaian Alat Kesenian dan Kebudayaan, Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa dan Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah. Kegiatan ini telah menyerap dana sebesar Rp.709.422.300,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp.731.088.048,00 atau sekitar 97,04%. Dengan terserapnya anggaran sebesar Rp.709.422.300,00 telah mendukung pencapaian target kegiatan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah dengan sangat baik.

9.2 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah

Dalam tahun 2025 telah direalisasikan sub kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah. Kegiatan tersebut guna pemenuhan kebutuhan Belanja Natura dan Pakan-Natura, Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga, Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan dan Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa. Kegiatan ini telah menyerap dana sebesar Rp.525.913.500,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp.551.373.000,00 atau sekitar 95,38%. Dengan terserapnya anggaran sebesar Rp.525.913.500,00 telah mendukung pencapaian target kegiatan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah dengan sangat baik.

9.3 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat

Dalam tahun 2025 telah direalisasikan sub kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat. Kegiatan tersebut guna pemenuhan kebutuhan Belanja Natura dan Pakan-Natura, Belanja Natura dan Pakan-Pakan, Belanja Peralatan dan Mesin- Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use), Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, dan Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa. Kegiatan ini telah menyerap dana sebesar Rp.868.241.650,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp.1.152.515.000,00 atau sekitar 75.33%. Dengan terserapnya anggaran sebesar Rp.868.241.650,00 telah mendukung pencapaian target kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah dengan baik.

10. Penataan Organisasi terdiri dari 5 Sub Kegiatan yaitu :

10.1 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan

Dalam tahun 2025 telah direalisasikan sub kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan. Kegiatan tersebut guna pemenuhan kebutuhan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan, Belanja Pakaian Batik Tradisional, Belanja Pakaian Olahraga, Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia, Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan, Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang, Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan,

dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa. Kegiatan ini telah menyerap dana sebesar Rp.380.102.652,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp.386.512.402,00 atau sekitar 98,34%. Dengan terserapnya anggaran sebesar Rp.380.102.652,00 telah mendukung pencapaian target kegiatan Penataan Organisasi dengan sangat baik.

10.2 Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana

Dalam tahun 2025 telah direalisasikan sub kegiatan Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana. Kegiatan tersebut guna pemenuhan kebutuhan Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia, Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan, Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, dan Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa. Kegiatan ini telah menyerap dana sebesar Rp.142.294.000,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp.142.560.000,00 atau sekitar 99,81%. Dengan terserapnya anggaran sebesar Rp.142.294.000,00 telah mendukung pencapaian target kegiatan Penataan Organisasi dengan sangat baik.

10.3 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi

Dalam tahun 2025 telah direalisasikan sub kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi. Kegiatan tersebut guna pemenuhan kebutuhan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan, Belanja

Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, Belanja Bimbingan Teknis dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa, Kegiatan ini telah menyerap dana sebesar Rp.61.197.212,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp.61.274.482,00 atau sekitar 99,87%. Dengan terserapnya anggaran sebesar Rp.61.197.212,00 telah mendukung pencapaian target kegiatan Penataan Organisasi dengan sangat baik.

10.4 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana

Dalam tahun 2025 telah direalisasikan sub kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana. Kegiatan tersebut guna pemenuhan kebutuhan Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan, Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi, Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa. Kegiatan ini telah menyerap dana sebesar Rp.40.962.600,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp.41.044.000,00 atau sekitar 99,80%. Dengan terserapnya anggaran sebesar Rp.40.962.600,00 telah mendukung pencapaian target kegiatan Penataan Organisasi dengan sangat baik.

10.5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

Dalam tahun 2025 telah direalisasikan sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah. Kegiatan tersebut guna pemenuhan kebutuhan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-

Suvenir/Cendera Mata, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia, Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan, Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa. Kegiatan ini telah menyerap dana sebesar Rp.203.858.870,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp.204.176.878,00 atau sekitar 99,84%. Dengan terserapnya anggaran sebesar Rp.203.858.870,00 telah mendukung pencapaian target kegiatan Penataan Organisasi dengan sangat baik.

11. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan terdiri dari 3 Sub Kegiatan yaitu :

11.1 Fasilitas Keprotokolan

Dalam tahun 2025 telah direalisasikan sub kegiatan Fasilitas Keprotokolan. Kegiatan tersebut guna pemenuhan kebutuhan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak, Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara, Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan dan Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa. Kegiatan ini telah menyerap dana sebesar Rp.3.087.702.000,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp.3.090.000.000,00 atau sekitar 99,93%. Dengan terserapnya anggaran sebesar Rp.3.087.702.000,00 telah mendukung pencapaian target kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan dengan sangat baik.

11.2 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan

Dalam tahun 2025 telah direalisasikan sub kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan. Kegiatan tersebut guna pemenuhan kebutuhan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak, Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara, Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan dan Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa. Kegiatan ini telah menyerap dana sebesar Rp.3.289.920.000,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp.3.290.000.000,00 atau sekitar 100%. Dengan terserapnya anggaran sebesar Rp.3.289.920.000,00 telah mendukung pencapaian target kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan dengan sangat baik.

11.3 Pendokumentasian Tugas Pimpinan

Dalam tahun 2025 telah direalisasikan sub kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan. Kegiatan tersebut guna pemenuhan kebutuhan Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara,. Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan dan Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa. Kegiatan ini telah menyerap dana sebesar Rp.1.642.503.999,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp.1.648.561.000,00 atau sekitar 99,63%. Dengan terserapnya anggaran sebesar Rp.1.642.503.999,00 telah mendukung pencapaian target kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan dengan sangat baik.

2.3.2 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT, ada 4 kegiatan yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Administrasi Tata Pemerintahan terdiri dari 3 Sub Kegiatan yaitu :

1.1 Penataan Administrasi Pemerintahan

Dalam tahun 2025 telah direalisasikan sub kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan. Kegiatan tersebut guna pemenuhan kebutuhan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia, Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang, Belanja Bimbingan Teknis dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa. Kegiatan ini telah menyerap dana sebesar Rp.166.148.446,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp.273.984.736,00 atau sekitar 60,64%. Dengan terserapnya anggaran sebesar Rp. 166.148.446,00 telah mendukung pencapaian target kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan dengan cukup baik.

1.2 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan

Dalam tahun 2025 telah direalisasikan sub kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan. Kegiatan tersebut guna pemenuhan kebutuhan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Belanja Pakaian Batik Tradisional, Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia, Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan, Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Belanja Perjalanan Dinas Biasa, Belanja

Perjalanan Dinas Dalam Kota, Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi, Belanja Modal Lukisan dan Ukiran dan Belanja Modal Tanda Penghargaan Bidang Lainnya. Kegiatan ini telah menyerap dana sebesar Rp.1.267.327.540,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp.1.511.721.000,00 atau sekitar 83,83%. Dengan terserapnya anggaran sebesar Rp.1.267.327.540,00 telah mendukung pencapaian target kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan dengan baik.

1.3 Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah

Dalam tahun 2025 telah direalisasikan sub kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah. Kegiatan tersebut guna pemenuhan kebutuhan Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia. Kegiatan ini telah menyerap dana sebesar Rp.38.690.000,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp.74.725.000,00 atau sekitar 51,78%. Dengan terserapnya anggaran sebesar Rp.38.690.000,00 maka telah mendukung pencapaian target kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan dengan cukup baik.

2. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat terdiri dari 5 Sub Kegiatan yaitu :

2.1 Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual

Dalam tahun 2025 telah direalisasikan sub kegiatan Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual. Kegiatan tersebut guna pemenuhan kebutuhan, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan

Cetak, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor, Belanja Obat-Obatan-Obat, Belanja Natura dan Pakan-Pakan, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL), Belanja Pakaian Adat Daerah, Belanja Pakaian Batik Tradisional, Belanja Pakaian Olahraga, Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia, Belanja Jasa Tenaga Ahli, Belanja Jasa Tenaga Keamanan, Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara, Belanja Paket/Pengiriman, Belanja Registrasi/Keanggotaan, Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang, Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang, Belanja Perjalanan Dinas Biasa, Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan, Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan dan Belanja Modal Tanda Penghargaan Bidang Lainnya, Kegiatan ini telah menyerap dana sebesar Rp.7.300.049.626,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp.8.077.135.380,00 atau sekitar 90,38%. Dengan terserapnya anggaran sebesar Rp. 7.300.049.626,00 telah mendukung pencapaian target kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dengan sangat baik.

2.2 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial

Dalam tahun 2025 telah direalisasikan sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial. Kegiatan tersebut guna pemenuhan kebutuhan, Belanja

Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia, Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, Belanja Beasiswa, Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat dan Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar. Kegiatan ini telah menyerap dana sebesar Rp.1.006.449.000,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp.1.019.249.500,00 atau sekitar 98.74%. Dengan terserapnya anggaran sebesar Rp. 1.006.449.000,00 maka telah mendukung pencapaian target kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dengan sangat baik.

2.3 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat

Dalam tahun 2025 telah direalisasikan sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan terkait Kesejahteraan Masyarakat. Kegiatan tersebut guna pemenuhan kebutuhan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia, Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara, Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, Belanja Sewa Asrama, Belanja Perjalanan Dinas Biasa dan Belanja Beasiswa. Kegiatan ini telah menyerap dana sebesar Rp.1.212.057.062,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp.1.220.470.862,00 atau sekitar 99,31%. Dengan terserapnya anggaran sebesar Rp. 1.212.057.062,00 maka

telah mendukung pencapaian target kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dengan sangat baik.

2.4 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat

Dalam tahun 2025 telah direalisasikan sub kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat. Kegiatan tersebut guna pemenuhan kebutuhan Belanja Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia, Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan dan Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa. Kegiatan ini telah menyerap dana sebesar Rp.74.483.596,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp.77.228.000,00 atau sekitar 96,45%. Dengan terserapnya anggaran sebesar Rp. 74.483.596,00 maka telah mendukung pencapaian target kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dengan sangat baik.

2.5 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Dalam tahun 2025 telah direalisasikan sub kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing. Kegiatan tersebut guna pemenuhan

kebutuhan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia, Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan dan Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa. Kegiatan ini telah menyerap dana sebesar Rp.58.293.070,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp.59.398.872.000,00 atau sekitar 98,14% Dengan terserapnya anggaran sebesar Rp. 58.293.070,00 maka telah mendukung pencapaian target kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dengan sangat baik.

3. Fasilitas dan Koordinasi Hukum terdiri dari 3 Sub Kegiatan yaitu :

3.1 Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah

Dalam tahun 2025 telah direalisasikan sub kegiatan Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah. Kegiatan tersebut guna pemenuhan kebutuhan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak, Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan, Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa. Kegiatan ini telah menyerap dana sebesar Rp.234.391.443,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp.239.049.430,00 atau sekitar 98,05%. Dengan terserapnya anggaran sebesar Rp. 234.391.443,00 maka telah mendukung pencapaian target kegiatan Fasilitas dan Koordinasi Hukum dengan sangat baik.

3.2 Fasilitas Bantuan Hukum

Dalam tahun 2025 telah direalisasikan sub kegiatan Fasilitas Bantuan Hukum. Kegiatan tersebut guna pemenuhan kebutuhan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak,Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia, Belanja Registrasi/Keanggotaan, Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Belanja Perjalanan Dinas Biasa dan Belanja Modal Tanah Persil Lainnya. Kegiatan ini telah menyerap dana sebesar Rp.23.692.657.819,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp.23.719.888.214,00 atau sekitar 99,89%. Dengan terserapnya anggaran sebesar Rp. 23.692.657.819,00 telah mendukung pencapaian target kegiatan Fasilitas dan Koordinasi Hukum dengan sangat baik.

3.3 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum

Dalam tahun 2025 telah direalisasikan sub kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum. Kegiatan tersebut guna pemenuhan kebutuhan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia, Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Belanja Perjalanan Dinas Biasa, dan

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota. Kegiatan ini telah menyerap dana sebesar Rp.117.181.750,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp.117.401.750,00 atau sekitar 99,81%. Dengan terserapnya anggaran sebesar Rp. 117.181.750,00 maka telah mendukung pencapaian target kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum dengan sangat baik.

4. Fasilitasi Kerjasama Daerah terdiri dari 3 Sub Kegiatan yaitu :

4.1 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri

Dalam tahun 2025 telah direalisasikan sub kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri. Kegiatan tersebut guna pemenuhan kebutuhan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia, Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan, Belanja Jasa Tenaga Ahli, Belanja Registrasi/Keanggotaan, Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi, Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik, Belanja Bimbingan Teknis dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa. Kegiatan ini telah menyerap dana sebesar Rp.1.891.455.037,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp.2.065.077.734,00 atau sekitar 91,59%. Dengan terserapnya anggaran sebesar Rp. 1.891.455.037,00 maka telah mendukung

pencapaian target kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah dengan sangat baik.

4.2 Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri

Dalam tahun 2025 telah direalisasikan sub kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri. Kegiatan tersebut guna pemenuhan kebutuhan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia, Belanja Jasa Tenaga Ahli, Belanja Registrasi/Keanggotaan, Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa. Kegiatan ini telah menyerap dana sebesar Rp.689.523.625,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp.703.008.973,00 atau sekitar 98,08%. Dengan terserapnya anggaran sebesar Rp. 689.523.625,00 telah mendukung pencapaian target kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah dengan sangat baik.

4.3 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama

Dalam tahun 2025 telah direalisasikan sub kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama. Kegiatan tersebut guna pemenuhan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia, Belanja Jasa Tenaga Ahli, Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan,

Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Belanja Perjalanan Dinas Biasa, dan Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota. Kegiatan ini telah menyerap dana sebesar Rp.179.771.800,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp.188.933.900,00 atau sekitar 95,15%. Dengan terserapnya anggaran sebesar Rp. 179.771.800,00 maka telah mendukung pencapaian target kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah dengan sangat baik.

2.3.3. PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN, ada 4 kegiatan yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian terdiri dari 4 Sub Kegiatan yaitu :

1.1 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMN dan BLUD

Dalam tahun 2025 telah direalisasikan sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMN dan BLUD. Kegiatan tersebut guna pemenuhan kebutuhan BelanjaBelanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak,Belanja Makanan dan Minuman Rapat,Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Belanja Bimbingan Teknis dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa. Kegiatan ini telah menyerap dana sebesar Rp.156.497.348,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp.159.422.058,00 atau sekitar 98,17%. Dengan terserapnya anggaran sebesar Rp. 156.497.348,00 maka telah mendukung pencapaian target kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian dengan sangat baik.

1.2 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian

Dalam tahun 2025 telah direalisasikan sub kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian. Kegiatan tersebut guna pemenuhan kebutuhan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan, Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia, Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan, Honorarium Rohaniwan, Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa. Kegiatan ini telah menyerap dana sebesar Rp.755.812.964,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp.760.767.747,00 atau sekitar 99,35%. Dengan terserapnya anggaran sebesar Rp. 755.812.964,00 maka telah mendukung pencapaian target kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian dengan sangat baik.

1.3 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil

Dalam tahun 2025 telah direalisasikan sub kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil. Kegiatan tersebut guna pemenuhan kebutuhan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia, Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan, Honorarium Rohaniwan, Belanja Honorarium

Penanggungjawaban Pengelola Keuangan dan Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa. Kegiatan ini telah menyerap dana sebesar Rp.208.511.300,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp.220.570.900,00 atau sekitar 94,53%. Dengan terserapnya anggaran sebesar Rp. 208.511.300,00 maka telah mendukung pencapaian target kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian dengan sangat baik.

1.4 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD

Dalam tahun 2025 telah direalisasikan sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD. Kegiatan tersebut guna pemenuhan kebutuhan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia, Honorarium Rohaniwan, Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan dan Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa. Kegiatan ini telah menyerap dana sebesar Rp.75.482.500,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp.76.322.500,00 atau sekitar 98,90%. Dengan terserapnya anggaran sebesar Rp. 75.482.500,00 maka telah mendukung pencapaian target kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian dengan sangat baik.

2. Pelaksanaan Administrasi Pembangunan terdiri dari 3 Sub Kegiatan yaitu :

2.1 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan

Dalam tahun 2025 telah direalisasikan sub kegiatan Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan. Kegiatan tersebut guna pemenuhan kebutuhan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia, Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan, Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa. Kegiatan ini telah menyerap dana sebesar Rp.205.279.342,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp.246.759.844,00 atau sekitar 83,19%. Dengan terserapnya anggaran sebesar Rp. 205.279.342,00 maka telah mendukung pencapaian target kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan dengan baik.

2.2 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan

Dalam tahun 2025 telah direalisasikan sub kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan. Kegiatan tersebut guna pemenuhan kebutuhan Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia, Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan, Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Belanja Bimbingan Teknis dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa. Kegiatan ini telah

menyerap dana sebesar Rp.534.442.748,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp.605.628.250,00 atau sekitar 88,25%. Dengan terserapnya anggaran sebesar Rp. 534.442.748,00 maka telah mendukung pencapaian target kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan dengan baik.

2.3 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan

Dalam tahun 2025 telah direalisasikan sub kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan. Kegiatan tersebut guna pemenuhan kebutuhan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia, Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi, Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Belanja Bimbingan Teknis dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa. Kegiatan ini telah menyerap dana sebesar Rp.447.130.470,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp.513.922.470,00 atau sekitar 87,00%. Dengan terserapnya anggaran sebesar Rp.447.130.470,00 maka telah mendukung pencapaian target kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan dengan baik.

3. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa terdiri dari 3 Sub Kegiatan yaitu :

3.1 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

Dalam tahun 2025 telah direalisasikan sub kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa. Kegiatan tersebut guna pemenuhan kebutuhan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak, Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia, Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Belanja Modal Personal Computer. Kegiatan ini telah menyerap dana sebesar Rp.688.374.013,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp.766.281.000,00 atau sekitar 89,83%. Dengan terserapnya anggaran sebesar Rp.688.374.013,00 maka telah mendukung pencapaian target kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa dengan sangat baik.

3.2 Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik

Dalam tahun 2025 telah direalisasikan sub kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik. Kegiatan tersebut guna pemenuhan kebutuhan Belanja Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak, Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Belanja Perjalanan Dinas Biasa. Kegiatan ini telah menyerap dana sebesar Rp.317.229.620,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp.341.967.000,00 atau sekitar 92,77%. Dengan terserapnya anggaran sebesar Rp. 317.229.620,00 maka telah mendukung pencapaian target kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa dengan sangat baik.

3.3 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa

Dalam tahun 2025 telah direalisasikan sub kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa. Kegiatan tersebut guna pemenuhan kebutuhan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak, Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Belanja Bimbingan Teknis, Belanja Perjalanan Dinas Biasa dan Belanja Modal Komputer Unit Lainnya. Kegiatan ini telah menyerap dana sebesar Rp.393.072.400,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp.440.466.940,00 atau sekitar 89,24%. Dengan terserapnya anggaran sebesar Rp. 393.072.400,00 maka telah mendukung pencapaian target kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa dengan Baik.

4. Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam terdiri dari 3 Sub Kegiatan yaitu :

4.1 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan

Dalam tahun 2025 telah direalisasikan sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan. Kegiatan tersebut guna pemenuhan kebutuhan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, dan Belanja Perjalanan Dinas. Kegiatan ini telah menyerap dana sebesar Rp.50.961.500,00 dari alokasi anggaran sebesar

Rp.50.961.500,00 atau sekitar 100,00%. Dengan terserapnya anggaran sebesar Rp. 50.961.500,00 maka telah mendukung pencapaian target kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam dengan sangat baik.

4.2 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup

Dalam tahun 2025 telah direalisasikan sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup. Kegiatan tersebut guna pemenuhan kebutuhan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan, Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa. Kegiatan ini telah menyerap dana sebesar Rp.32.065.000,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp.32.065.875.000,00 atau sekitar 100%. Dengan terserapnya anggaran sebesar Rp. 32.065.000,00 maka telah mendukung pencapaian target kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam dengan sangat baik.

4.3 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air

Dalam tahun 2025 telah direalisasikan sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air. Kegiatan tersebut guna pemenuhan kebutuhan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan

Kantor-Bahan Cetak, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan, Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan, Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa. Kegiatan ini telah menyerap dana sebesar Rp.132.617.495,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp.161.017.495,00 atau sekitar 82,36%. Dengan terserapnya anggaran sebesar Rp. 132.617.495,00 maka telah mendukung pencapaian target kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam dengan baik.

BAB III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Sebagian besar pelaksanaan kegiatan dalam rangka pelaksanaan program dapat mencapai target kinerja yang ditetapkan. Target yang tidak dapat dicapai pada umumnya merupakan kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi pelaksanaannya serta kegiatan yang pelaksanaannya sangat terkait/tergantung situasi dan kondisi pada saat pelaksanaan, dan ada beberapa kegiatan yang sudah terlaksana namun tidak dapat dibayarkan pada tahun 2025 dan menjadi utang pada tahun 2025 karena tidak tersedianya dana untuk pembayaran kegiatan tersebut .

3.2. Hambatan dan Kendala Pencapaian Target

Pencapaian target kinerja Anggaran Sekretariat Daerah Kota Samarinda secara keseluruhan dapat dikatakan tercapai dengan baik, hanya ada beberapa kegiatan yang tidak tercapai yakni :

1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Dalam tahun 2025 telah direalisasikan sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Kegiatan ini telah menyerap dana sebesar Rp.557.152.899,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp.1.240.210.200,00 atau sekitar 44,92%.

2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Dalam tahun 2025 telah direalisasikan sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga. Kegiatan ini telah menyerap dana sebesar Rp.365.786.006,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp.734.489.874,00 atau sekitar 49,80%.

3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Dalam tahun 2025 telah direalisasikan sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya. Kegiatan ini telah menyerap dana sebesar Rp.86.623.800,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp.300.245.000,00 atau sekitar 28,85%.
4. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
Dalam tahun 2025 telah direalisasikan sub kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya. Kegiatan ini telah menyerap dana sebesar Rp.112.676.431,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp.251.508.000,00 atau sekitar 44,80%.
5. Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Dalam tahun 2025 telah direalisasikan sub kegiatan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Kegiatan ini telah menyerap dana sebesar Rp.224.791.493,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp.667.553.950,00 atau sekitar 33,67%.
6. Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Dalam tahun 2025 telah direalisasikan sub kegiatan Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH. Kegiatan ini menyerap dana sebesar Rp 0 dari alokasi anggaran sebesar Rp.103.000.000,00 atau sekitar 0 %. Hal ini disebabkan
7. Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah
Dalam tahun 2025 telah direalisasikan sub kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah. Kegiatan ini telah menyerap dana sebesar

Rp.38.690.000,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp.74.725.000,00 atau sekitar 51,78%.

Adapun hambatan dan kendala pencapaian target dari kelima kegiatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Dalam tahun 2025 telah direalisasikan sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Kegiatan ini telah menyerap dana sebesar Rp.557.152.899,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp.1.240.210.200,00 atau sekitar 44,92%. Hal ini terjadi karena adanya Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang sudah terlaksana namun tidak dapat dibayarkan pada tahun 2025 dan menjadi utang pada tahun 2025 karena tidak tersedianya dana untuk pembayaran kegiatan tersebut.

2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Dalam tahun 2025 telah direalisasikan sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga. Kegiatan ini telah menyerap dana sebesar Rp.365.786.006,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp.734.489.874,00 atau sekitar 49,80%. Hal ini disebabkan ada Belanja yang sudah terlaksana namun tidak dapat dibayarkan pada tahun 2025 dan menjadi utang pada tahun 2025 karena tidak tersedianya dana untuk pembayaran kegiatan tersebut.

3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah

Dalam tahun 2025 telah direalisasikan sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya. Kegiatan ini telah menyerap dana sebesar Rp.86.623.800,00 dari alokasi anggaran sebesar

Rp.300.245.000,00 atau sekitar 28,85%. Hal ini disebabkan karena Gedung Balaikota dalam masa Rebovasi sehingga mengurangi Keg. Pemeliharaan yang bersifat insidentil.

4. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya

Dalam tahun 2025 telah direalisasikan sub kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya. Kegiatan ini telah menyerap dana sebesar Rp.112.676.431,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp.251.508.000,00 atau sekitar 44,80%. Hal ini disebabkan ada belanja yang sudah terlaksana namun tidak dapat dibayarkan pada tahun 2025 dan menjadi utang pada tahun 2025 karena tidak tersedianya dana untuk pembayaran kegiatan tersebut.

5. Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Dalam tahun 2025 telah direalisasikan sub kegiatan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Kegiatan ini telah menyerap dana sebesar Rp.224.791.493,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp.667.553.950,00 atau sekitar 33,67%. Hal ini disebabkan pembayaran Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disesuaikan dengan kewajiban yang harus dibayarkan.

6. Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Dalam tahun 2025 telah direalisasikan sub kegiatan Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH. Kegiatan ini menyerap dana sebesar Rp 0 dari alokasi anggaran sebesar Rp.103.000.000,00 atau sekitar 0 %. Hal ini disebabkan selama tahun 2025 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak ada melaksanakan medical check up.

7. Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah

Dalam tahun 2025 telah direalisasikan sub kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah. Kegiatan ini telah menyerap dana sebesar Rp.38.690.000,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp.74.725.000,00 atau sekitar 51,78%. Hal ini disebabkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Efisiensi pelaksanaan kegiatan

Beberapa kebutuhan belanja dapat ditekan melalui penggunaan fasilitas internal pemerintah daerah atau dukungan dari Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Samarinda, sehingga biaya yang dikeluarkan lebih kecil dari perencanaan awal.

2. Kegiatan tidak dapat direalisasikan penuh

Terdapat beberapa kegiatan yang direncanakan tetapi tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan sumber daya manusia, keterlambatan koordinasi lintas perangkat daerah, atau faktor eksternal (misalnya agenda nasional yang bersinggungan dengan kegiatan daerah).

3. Belum optimalnya realisasi anggaran bukan disebabkan oleh hambatan pelaksanaan secara keseluruhan, namun lebih dipengaruhi oleh faktor efisiensi penggunaan anggaran, penyesuaian jadwal kegiatan, serta adanya dukungan fasilitas dari perangkat daerah lain, sehingga kebutuhan belanja lebih rendah dari rencana awal.

4.1 Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

i. Pendapatan – LRA	Rp.	77.124.000,00
---------------------	-----	---------------

ii. Belanja	Rp .	130.093.660.519,00
-------------	------	--------------------

Realisasi Belanja Modal Tahun 2025 pada Sekretariat Daerah Kota Samarinda adalah sebesar Rp.28.929.020.999,00 atau sekitar 92,91% dari dana yang

tersedia dalam DPA sebesar Rp.31.134.390.528,00. Bila dibandingkan dengan Tahun 2024 jumlah ini mengalami penurunan sebesar Rp.5.046.306.316,00. Belanja Modal ini terdiri dari Belanja Modal Tanah sebesar Rp.23.006.451.144,00, Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp.2.337.604.055,00, Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp.3.451.957.800,00 dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp.133.008.000,00.

Adapun rincian Belanja Sekretariat Kota Samarinda adalah sebagai berikut :

NO	BELANJA	ANGGARAN (Rp)	REALISASI		SISA
			(Rp)	(%)	
1	BELANJA OPERASI	110,255,372,748.00	101,164,639,520.00	91.75	9,090,733,228.00
1	Belanja Pegawai	32,559,985,289.00	29,917,972,068.00	91.89	2,642,013,221.00
2	Belanja Barang dan Jasa	76,995,387,459.00	70,546,667,452.00	91.62	6,448,720,007.00
3	Belanja Hibah	700,000,000.00	700,000,000.00	100.00	-
2	BELANJA MODAL	31,134,390,528.00	28,929,020,999.00	92.92	2,205,369,529.00
1	Belanja Modal Tanah	23,006,451,144.00	23,006,451,144.00	100.00	-
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4,290,497,998.00	2,337,604,055.00	54.48	1,952,893,943.00
3	Belanja Modal Gedung & Bangunan	3,695,841,386.00	3,451,957,800.00	93.40	243,883,586.00
4	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	141,600,000.00	133,008,000.00	93.93	8,592,000.00
	JUMLAH	141,389,763,276.00	130,093,660,519.00	92.01	11,296,102,757.00

4.2 Penjelasan Neraca

4.2.1 ASET **Rp 247.946.576.848,72**

4.2.1.1 Aset Lancar **Rp 2.946.429.559,12**

1. Beban Dibayar Di Muka **Rp 2.781.178.337.12**

Jumlah tersebut merupakan Beban Dibayar Di Muka atas Biaya Asuransi Gedung Kantor Sekretariat Kota Samarinda, Asuransi Kendaraan

Bermotor Belanja Sewa Asrama, dan Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang, yang dapat disajikan dari daftar berikut :

ASURANSI DIBAYAR DI MUKA PER 31 DESEMBER 2025

NO.	URAIAN		JUMLAH
1	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	Sewa Mobil Land Rover Defender 110 x Dynamic SE) kepada PT. CSM CORPORATAMA	1.813.900.005,50
2	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	Sewa Mobil Toyota Hilux DC 2.4 G 4x4 MT D PU 2022 kepada Pt. Serasi Autoraya	45.000.000,00
3	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	Sewa Mobil Toyota All New Veloz Q 1.5 AT 2022 (2 Unit) kepada Pt. Serasi Autoraya	55.999.997,60
4	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	Sewa Mobil Veloz 1.5 Q CVT (Non Premium Color) 2025 kepada Pt. Serasi Autoraya	38.160.001,67
5	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	Sewa Mobil Pajero Dakar 2.4 4x2 AT 2023 kepada Pt. Serasi Autoraya	272.500.005,00
		Sewa Mobil Innova Zeniz 2.0 V CVT 2023 kepada Pt. Serasi Autoraya	
6	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	Sewa Mobil Mitsubishi All New Pajero Sport Dakar 4x2 AT 2022 kepada Pt. Serasi Autoraya	56.000.001,60
7	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	Sewa Mobil All New Veloz CVT A/T (2 unit) kepada PT Samana Jaya Propertindo	156.199.989,92

8	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	Sewa Mobil Mitsubishi All New Pajero Sport Dakar 4x2 AT 2022 kepada Pt. Serasi Autoraya	70.000.002,50
9	Belanja Sewa Asrama	Sewa Asrama untuk Mahasiswa Putri Kota Samarinda kepada Hermin Asrin Randa Bunga	50.000.000,00
10	Asuransi Barang Milik Daerah (Asuransi Gedung) kepada PT. Asuransi Bintang	Asuransi Gedung (Asuransi Gempa Bumi)	181.775.000,00
		Asuransi Gedung (Asuransi Komprehensif Properti)	
11	Asuransi Barang Milik Daerah (Asuransi Kendaraan Bermotor) kepada PT. Asuransi Bintang, Tbk	Asuransi Barang Milik Daerah (Asuransi Kendaraan Bermotor) kepada PT. Asuransi Bintang, Tbk	20.828.333,33
12	Asuransi Barang Milik Daerah (Asuransi Kendaraan Bermotor) kepada PT. Asuransi Bintang, Tbk	Asuransi Barang Milik Daerah (Asuransi Kendaraan Bermotor) kepada PT. Asuransi Bintang, Tbk	20.815.000,00
JUMLAH			2,781,178,337.12

2. Persediaan Rp 165.251.222,00

Jumlah tersebut merupakan sisa persediaan Alat Tulis Kantor, Alat Listrik, Belanja Souvenir/Cenderamata, Belanja Natura & Pakan-Pakan, Belanja Peralatan dan Mesin Home Use, Belanja Alat Pembersih, dan Belanja Modal Mesin Hitung yang ada pada Sekretariat Kota Samarinda per 31 Desember 2025, dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Belanja Alat Tulis kantor (ATK)	Rp 19.957.220,00
2	Belanja Alat Listrik	Rp 2.736.000,00
3	Belanja Souvenir /Cenderamata	Rp 102.420.002,00
4	Belanja Natura & Pakan-Pakan	Rp 21.070.300,00
5	Belanja Peralatan & Mesin Home Use	Rp 525.000,00
6	Belanja Alat Pembersih	Rp 16.922.700,00
7	Belanja Modal Mesin Hitung	Rp 1.620.000,00
	Jumlah	Rp 165.251.222,00

4.2.1.2 Aset Tetap **Rp 244.668.422.209,60**

1. Tanah **Rp 225.322.931.772,00**

Merupakan nilai tanah yang dimiliki/ dan atau dikuasai Sekretariat Daerah Kota Samarinda sampai dengan 31 Desember 2025 dan digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

2. Peralatan dan Mesin **Rp 92.132.319.394,60**

Merupakan nilai peralatan dan mesin yang dimiliki/ dan atau dikuasai Sekretariat Daerah Kota Samarinda sampai dengan 31 Desember 2025 dan digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

3. Gedung dan Bangunan **Rp 41.420.897.540,00**

Merupakan nilai gedung dan bangunan yang dimiliki/ dan atau dikuasai Sekretariat Daerah Kota Samarinda sampai dengan 31 Desember 2025 dan digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

4. Aset Tetap Lainnya Rp 464.811.000,00

Merupakan nilai aset tetap lainnya yang dimiliki/ dan atau dikuasai Sekretariat Daerah Kota Samarinda sampai dengan 31 Desember 2025 dan digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

5. Akumulasi Penyusutan (Rp 114.672.537.497,00)

Merupakan Akumulasi Penyusutan dari Aset Tetap tahun 2025 pada Sekretariat Kota Samarinda.

4.2.1.3 Aset Lainnya

Aset Lainnya Rp. 331.725.080,00

Merupakan nilai Aset Lainnya yang dimiliki dan atau dikuasai Sekretariat Kota Samarinda sampai dengan 31 Desember 2025 berupa Aset Tidak Berwujud Lainnya, Aset Lain-lain, dan Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud, yaitu sebagai berikut :

1	Aset Tidak Berwujud	2.094.353.600,00
2	Aset Lain-lain	12.150.000,00
3	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(1.765.578.520,00)
4	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(9.200.000,00)
	TOTAL	331.725.080,00

4.2.2 Kewajiban Rp 5.127.282.855,00

4.2.2.1 Kewajiban Jangka Pendek Rp 5.127.282.855,00

Kewajiban Jangka Pendek tersebut terdiri dari Utang Belanja sebesar Rp.5.127.282.855,00.

Adapun rincian Kewajiban Jangka Pendek adalah sebagai berikut :

1. Utang Belanja	Rp.	5.127.282.855,00
-------------------------	------------	-------------------------

Saldo Utang Belanja Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 276.607.119,00 yang terdiri dari Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha - pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp.3.375.000,00, dan Belanja Accrued sebesar Rp.251.130.296,00, serta kekurangan pembayaran iuran 4% jaminan kesehatan Tahun 2024 sebesar Rp.22.101.823,00.

Pada tahun 2025 semua Utang Belanja Tahun 2024 telah dilakukan pembayaran sehingga tidak ada lagi sisa Utang Belanja Tahun 2024. *(Daftar Pembayaran Utang Sekretariat Kota Samarinda terlampir).*

Tahun 2025 terdapat penambahan Utang Belanja yang terdiri dari Utang kepada Pihak Ketiga sebesar Rp.3.917.440.213,00, dan Utang kepada Pegawai sebesar Rp.1.209.842.642,00. Utang kepada Pihak Ketiga sebesar Rp.3.917.440.213,00 tersebut merupakan utang atas belanja modal dan belanja barang jasa yang terdapat pada Bagian Umum sebesar Rp.3.601.109.863,00, Bagian Tata Pemerintahan sebesar Rp.167.010.350,00, Bagian Kesejahteraan Rakyat sebesar Rp. 119.320.000,00, dan Bagian Perencanaan dan Keuangan sebesar Rp.30.000.000,00. Sedangkan Utang kepada Pegawai sebesar Rp.1.209.842.642,00 merupakan Utang atas pembayaran Tambahan Tunjangan Penghasilan Bulan Desember Tahun 2025 kepada pegawai Sekretariat Daerah Kota Samarinda. *(Surat Pernyataan Utang dan Rekapitulasi Utang Sekretariat Kota Samarinda terlampir).*

4.2.3 Ekuitas	Rp.	242.819.293.993,72
----------------------	------------	---------------------------

Ekuitas Sekretariat Kota Samarinda per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp.242.819.293.993,72.

Ekuitas tersebut merupakan kekayaan bersih yang dimiliki Sekretariat Kota Samarinda yang merupakan selisih antara aset sebesar Rp.247.946.576.848,72 dengan kewajiban sebesar Rp.5.127.282.855,00.

4.3 Penjelasan Laporan Operasional Kegiatan Operasional

1. Dalam Laporan Operasional Sekretariat Daerah Kota Samarinda tahun 2025 dapat dijelaskan bahwa terdapat Pendapatan yang berasal dari Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp.77.124.000,00. Bila dibandingkan dengan tahun 2024 nilai ini mengalami penurunan sebesar Rp.6.876.000,00 atau sekitar 8,19%.
2. Beban Tahun 2025 yaitu sebesar Rp.115.730.146.736,78 yang bila dibandingkan dengan tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp.14.007.621.718,14 atau sekitar 10,80%

Beban ini terdiri dari :

2.1 Beban Operasi sebesar Rp.105.600.866.684,78 yang terdiri dari :

- Beban Pegawai sebesar Rp.31.124.439.710,00 yang bila dibandingkan dengan tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp.1.900.921.003,00 atau sekitar 5,76%.
- Beban Barang dan Jasa sebesar Rp.73.776.426.974,78 yang bila dibandingkan dengan tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp.8.037.190.119,14 atau sekitar 9,82%.
- Beban Hibah sebesar Rp.700.000.000,00 yang bila dibandingkan dengan tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp.3.976.124.000,00 atau sekitar 85,03%.

2.2 Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp.10.129.280.052,00 yang bila dibandingkan dengan tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp.93.386.596,00 atau sekitar 0,91%.

Dari nilai Pendapatan dan Beban tersebut didapatkan Defisit dari Operasi sebesar (Rp.115.653.022.736,78).

3. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Terdapat Defisit dari Kegiatan Non Operasioanl Lainnya-LO sebesar (Rp.14.400.000,00)

Dari Kegiatan Operasional dan Kegiatan Non Operasional tersebut didapatkan Defisit-LO sebesar (Rp.115.638.622.736,78,00)

4.4 Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas

Dalam Laporan Perubahan Ekuitas Sekretariat Daerah Kota Samarinda tahun 2025 dapat dijelaskan bahwa terdapat Ekuitas Awal sebesar Rp.251.447.831.355,50 dan Defisit-LO pada tahun 2025 sebesar (Rp.115.638.622.736,78), dan terdapat RK PPKD sebesar Rp.130.016.536.519,00, serta Koreksi Lain-Lain sebesar (Rp.23.006.451.144,00) sehingga didapat Ekuitas Akhir sebesar Rp.242.819.293.993,72.

BAB V. PENUTUP

Laporan Keuangan Sekretariat Kota Samarinda yang disusun dengan menggunakan alat bantu software SIPD yang diharapkan dapat menyajikan informasi mengenai pengelolaan keuangan daerah yang memadai.

Dari uraian yang disajikan pada bab-bab terdahulu dapat disampaikan beberapa simpulan sebagai berikut :

1. Realisasi Anggaran Pendapatan Sekretariat Kota Samarinda Tahun 2025 adalah sebesar Rp.77.124.000,00 atau sekitar 62,76%. Pendapatan ini merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari Pendapatan Retribusi Daerah berupa hasil dari Penyewaan Bis Pemkot Samarinda selama tahun 2025.
2. Realisasi Belanja Operasi Tahun 2025 pada Sekretariat Kota Samarinda adalah sebesar Rp.101.164.639.520,00 atau sekitar 91,75% dari dana yang tersedia dalam DPA sebesar Rp.110.255.372.748,00. Bila dibandingkan dengan Tahun 2024 jumlah ini mengalami penurunan sebesar Rp.14.425.062.875,00. Belanja Operasi ini terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp.29.917.972.068,00, Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.70.546.667.452,00, dan Belanja Hibah sebesar Rp.700.000.000,00.
3. Realisasi Belanja Modal Tahun 2025 pada Sekretariat Daerah Kota Samarinda adalah sebesar Rp.28.929.020.999,00 atau sekitar 92,91% dari dana yang tersedia dalam DPA sebesar Rp.31.134.390.528,00. Bila dibandingkan dengan Tahun 2024 jumlah ini mengalami penurunan sebesar Rp.5.046.306.316,00.

Belanja Modal ini terdiri dari Belanja Modal Tanah sebesar Rp.23.006.451.144,00, Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp.2.337.604.055,00, Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp.3.451.957.800,00 dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp.133.008.000,00.

4. Terdapat beberapa kegiatan yang realisasinya di bawah 60% yakni :

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Dalam tahun 2025 telah direalisasikan sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Kegiatan ini telah menyerap dana sebesar Rp.557.152.899,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp.1.240.210.200,00 atau sekitar 44,92%.

- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Dalam tahun 2025 telah direalisasikan sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga. Kegiatan ini telah menyerap dana sebesar Rp.365.786.006,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp.734.489.874,00 atau sekitar 49,80%.

- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Dalam tahun 2025 telah direalisasikan sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya. Kegiatan ini telah menyerap dana sebesar Rp.86.623.800,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp.300.245.000,00 atau sekitar 28,85%.

- Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya

Dalam tahun 2025 telah direalisasikan sub kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya. Kegiatan ini telah menyerap

dana sebesar Rp.112.676.431,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp.251.508.000,00 atau sekitar 44,80%.

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Dalam tahun 2025 telah direalisasikan sub kegiatan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Kegiatan ini telah menyerap dana sebesar Rp.224.791.493,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp.667.553.950,00 atau sekitar 33,67%.

- Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Dalam tahun 2025 telah direalisasikan sub kegiatan Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH. Kegiatan ini menyerap dana sebesar Rp 0 dari alokasi anggaran sebesar Rp.103.000.000,00 atau sekitar 0 %. Hal ini disebabkan

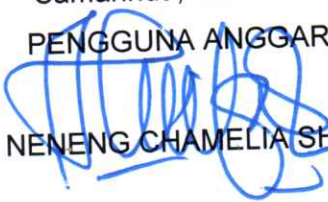
- Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah

Dalam tahun 2025 telah direalisasikan sub kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah. Kegiatan ini telah menyerap dana sebesar Rp.38.690.000,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp.74.725.000,00 atau sekitar 51,78%.

Demikian Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Samarinda , semoga kita selalu mendapat petunjuk dan bimbingan Allah SWT untuk dapat melaksanakan tugas dengan baik.

Samarinda, 22 Mei 2026

PENGGUNA ANGGARAN


NENENG CHAMELIA SHANTI